

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena saat ini pemerintah daerah selaku organisasi masyarakat menjadi sorotan tajam publik yang harus dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat atau penduduk atas kinerja yang akan dicapai.

Pada era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi pada sektor pemerintah sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Tidak hanya untuk pihak manajemen saja sebagai entitas namun juga diperuntukkan sebagai pertanggungjawaban (*accountability*) kepada pihak yang memerlukan (Hasanah, 2017). Hal ini mengakibatkan akuntansi harus menyesuaikan dan berkembang seiring dengan perkembangan sistem keuangan.

Banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat sekarang ini menimbulkan betapa pentingnya pelaporan keuangan pada pemerintahan. Pemerintah selaku pengelola dana masyarakat harus mampu menggunakan dan melaksanakan serta mengelola keuangan secara akuntabel yang dapat

dipertanggungjawabkan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintah. Dalam *Concept Statemen* Nomor 1 tentang tujuan dari pelaporan keuangan, *Governmental Accounting Standart Board* (GASB) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah (Rusmana, 2018).

Pemerintah harus menunjukkan akuntabilitasnya dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber dana yang diperoleh. Akuntabilitas pemerintah didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan fakta secara terbuka dari wakil-wakil rakyat yang telah mereka pilih.

Pelaporan keuangan memainkan peranan penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada publik dalam suatu lingkungan pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik dan mampu mempertanggungjawabkan kepada khalayak umum atau masyarakat.

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk mensejahterakan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dalam pemerintahan (Hasanah, 2017). Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Termasuk pembaharuan di dalam

sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah sejak lama, yaitu manual administrasi keuangan yang sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan secara sempurna. Sehingga diperlukan sebuah sistem pelaporan yang baik agar laporan keuangan dapat dihasilkan dan diterima oleh masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan menggunakan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang didasarkan pada Standart Akuntansi Pemerintahan.

Dalam amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam Bab 1 ayat 2 disebutkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga Standart Akuntansi Pemerintahan menjadi tolak ukur dijadikan pedoman pada setiap laporan akuntansi yang disajikan untuk mengetahui informasi mengenai posisi laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kinerja keuangan yang berguna dan bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan.

Penerapan standart akuntansi pemerintah yang baik akan membawa sebuah akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Selain itu akan membantu pemerintah daerah atau pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam

periode tertentu, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Pamungkas (2012) bahwa dimana apabila kedua faktor itu diterapkan dengan baik sesuai dengan perundang undangan maka hasil yang akan dicapai akan maksimal.

Dengan demikian pelaporan keuangan dapat dengan mudah untuk diadakan pengawasan dan audit dari instansi/lembaga pemerintah yang berwenang atau dari pihak internal melalui Badan pengawas Daerah (BAWASDA) dan BPKP serta pihak eksternal oleh BPK. Pengawasan internal pemerintah sangat diperlukan sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal dan akan berimplikasi.

Dengan ketiadaan standart akuntansi pemerintah bukan berarti penyusunan laporan keuangan tidak dapat disusun, melainkan ketentuan yang ada mengharuskan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam bentuk neraca, laporan arus kas, laporan perhitungan. Realisasi anggaran dan nota perhitungan (Hasanah, 2017).

Penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan. Purnama (2011) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung yaitu sebesar 55%. Penelitian lain dilakukan oleh Pamungkas (2012) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan pengawan kualitas laporan keuangan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik secara parsial ataupun secara simultan.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan periode penelitian. Lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Kabupaten Magetan dengan periode penelitian tahun 2019.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagiandari isu kebijakan strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good government*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2017). Di bidang ekonomi perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan di bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dibutuhkan transparansi terhadap masyarakat agar tidak memunculkan dampak negatif yaitu adanya ketidakadilan masyarakat, penyalahgunaan wewenang, menimbulkan kekacauan dalam alokasi sumber daya, dan memperbanyak kasus korupsi (Adha, 2016).

Sebagai contoh kasus korupsi, dapat dilihat dari tahun anggaran 2018. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan telah terbukti korupsi, yaitu dengan melakukan kecurangan dana pengadaan sepatu PNS senilai 1,2 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 100 juta lebih. Kasus tersebut hampir mirip dengan kasus korupsi E-KTP, karena kasus tersebut terjadi secara sistematis (www.kompas.com).

Pemerintah Kabupaten Magetan periode 2017-2019 telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (www.magetan.go.id). LKPD Kabupaten Magetan pada periode tersebut telah menyajikan laporan keuangan secara wajar material artinya PEMDA Kabupaten Magetan menyajikan laporan keuangan dengan baik, namun disisi lain masih

ditemukan beberapa pihak yang melakukan kecurangan. Artinya kemungkinan terindikasi faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi dalam melakukan akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga menimbulkan turunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan di Kabupaten Magetan.

Magetan merupakan daerah kabupaten yang memiliki potensi pendapatan daerah yang tinggi, terutama dari sektor wisata yang sangat potensial. Dengan adanya sektor wisata yang potensial tersebut, maka diperlukan implementasi dalam pengawasan kualitas laporan keuangan, serta penerapan standart akuntansi yang baik. Berdasar sumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menggaris bawahi bahwa pentingnya pelaksanaan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dimana BMD dikelola dengan kepastian hukum, transparansi, efisien dan kepastian nilai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magetan telah dan sedang melaksanakan kegiatan penyusunan Perda pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) inventarisasi BMD, penyusunan buku induk inventaris rekonsiliasi BMD dan penghapusan BMD. Selain itu masih banyak ditemukannya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan barang milik daerah diantaranya adanya barang hilang, *double accounting*, tanah belum bersertifikat, barang tak diketahui nilainya, kurang optimalnya pemanfaatan BMD dan lain-lain (Asroel, 2019).

Sesuai dengan permasalahan tersebut maka pemerintah magetan diharapkan untuk menangani hal tersebut perlu adanya solusi dengan menerapkan SIMDA BMD yang diharapkan dapat mereduksi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BMD tersebut. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Choirunnisa, 2013).

Melihat kondisi tersebut diketahui pemerintah daerah kabupaten Magetan masih belum menerapkan dan melakukan pengawasan secara internal terhadap aset yang dimiliki serta masih adanya tumpang tindih terhadap laporan yang diberikan sebagai penunjang atas akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magetan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah terjadi dan diuraikan diatas maka peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi terhadap akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan?

2. Bagaimana pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Penerapan Standar Akuntansi dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan ilmu tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, serta membandingkan teori dengan prakteknya.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan tugas otonomi daerah khususnya sebagai pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan informasi dalam mengambil kebijakan penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan, yang nantinya berhubungan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan dapat memperoleh pemahaman, memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke

bidang yang sesungguhnya dalam bidang penelitian standar pelaporan akuntansi.

